

PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Rencana Kerja Tahun 2026

Perangkat Daerah : Dinas Arsip dan Perpustakaan

telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 26 Juni 2026

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

RENCANA KERJA

(RENJA)

2026

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jln.Ahmad Yani No 21 Pariaman Telp.(0751)93916 Kode Pos 25512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 050.11/253/KEP/Dis.Arsip&Perpus/2025

TENTANG
RENCANA KERJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2026

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2008);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pemabngunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6);
9. Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor 050.11/726 /KEP/Dis.Arsip&Perpus/IX/2021Tentang Rencana Strategis Dinas

Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun
2021-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman Tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025
- KEDUA : Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA adalah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan untuk Periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
- KETIGA : Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA adalah sebagai :
- a. Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman.
 - b. Pedoman Penyusunan RKA dan DPA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman
 - c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
 - d. Pedoman dalam pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman.
- KEEMPAT : Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman.
- KELIMA : Sebagai akibat dari ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Dinas ini, Anggaran Penyusunan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 dibebankan kepada APBD
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025.

Ditetapkan di : Pariaman
Pada Tanggal : 17 Oktober 2025

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



Dra.SUMARNLM.Pd

Pembina Utama Muda/NIP.196810231993032002

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala Satuan Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi. Kebijakan, dan program dan kegiatan tahun 2026.

Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Dinas Kearsipan dan Perpustakaan demi terwujudnya visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sebagai lembaga teknis di bidang Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Semoga Rencana Kerja (Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 ini dapat memberi warna bagi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Padang Pariaman.

Pariaman, 17 Oktober 2025

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



Dra. SUMARNILM.Pd
Pembina Utama Muda/NIP.196810231993032002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB 1	PENDAHULUAN	
	1.Latar Belakang.....	1
	2.Landasan Hukum.....	7
	3.Maksud dan Tujuan.....	10
	4.Sistematika Penulisan.....	10
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
	1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rentra Perangkat Daerah.....	15
	2.Analisi Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	45
	3.Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	58
	4.Review Terhadap Rancangan Awal Renja.....	70
	5.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	76
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PRGOGRAM DAN KEGIATAN	
	1.Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	77
	2.Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	76
	3.Program dan Kegiatan.....	82
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	104
BAB V	PENUTUP.....	174

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 (TC.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra
2. Tabel 2.2 (TC.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3. Review Terhadap Rancangan Awal 2026
4. Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2026
5. Tabel 3.3 (TC. 33) Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
6. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu upaya strategis yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) menjadi instrumen penting yang berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Renja PD mencerminkan komitmen dan rencana setiap perangkat daerah dalam menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan yang spesifik di wilayah mereka. Dokumen ini menjadi landasan bagi perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam satu tahun anggaran.

Selain berfungsi sebagai panduan, Renja PD juga merupakan alat kontrol yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan adanya Renja PD, pemerintah daerah dapat memonitor efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta memperbaiki kekurangan dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penyusunan Renja PD yang baik dan tepat waktu menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa arah pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah.

Pentingnya Renja PD juga terlihat dari perannya sebagai dokumen yang mendukung sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Keselarasan antara Renja PD dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta dokumen perencanaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang terkoordinasi. Dengan adanya keterkaitan ini, diharapkan program dan kegiatan di tingkat daerah dapat sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.

Renja PD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi dasar bagi pengalokasian anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam penyusunan APBD, Renja PD digunakan sebagai acuan untuk menentukan prioritas pendanaan bagi program dan kegiatan yang telah direncanakan. Hal ini menjadikan Renja PD sebagai bagian



penting dari siklus anggaran pemerintah daerah, yang pada akhirnya bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh setiap perangkat daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renja PD merinci program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam rangka mencapai targettarget pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Dokumen ini memuat prioritas kegiatan yang menjadi fokus perangkat daerah selama satu tahun anggaran, disertai dengan target capaian kinerja yang diharapkan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja PD memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah selaras dengan kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja PD juga berfungsi sebagai sarana untuk mengoordinasikan pelaksanaan program antar-perangkat daerah agar terhindar dari duplikasi kegiatan dan memastikan pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien.

Dalam penyusunan Renja PD, perangkat daerah perlu memperhatikan berbagai isu strategis yang relevan dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh wilayahnya. Renja PD harus mampu menjawab kebutuhan pembangunan masyarakat serta mencerminkan kebijakan pembangunan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal maupun internal. Oleh karena itu, proses penyusunan Renja PD tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan proses konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa dokumen ini dapat mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada.

Renja PD juga berperan dalam mendorong akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Dengan adanya target-target yang jelas dalam Renja PD, perangkat daerah dapat lebih mudah diukur kinerjanya berdasarkan pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan prinsip pemerintahan yang berorientasi pada hasil (resultbased management), di mana efektivitas dan efisiensi program pemerintah menjadi ukuran utama keberhasilan.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan proses yang melibatkan berbagai tahapan, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga perumusan prioritas program dan kegiatan. Tahap awal dalam proses penyusunan Renja PD adalah melakukan analisis situasi yang mencakup evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya serta identifikasi masalah yang dihadapi oleh perangkat daerah. Evaluasi capaian kinerja ini menjadi dasar untuk menentukan langkah-langkah perbaikan dan penyesuaian program yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.



Tahap berikutnya adalah identifikasi isu strategis yang relevan dengan sektor atau bidang yang menjadi tugas pokok perangkat daerah. Isu strategis ini mencakup tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Perangkat daerah perlu memperhatikan perkembangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi daerah, sehingga program yang direncanakan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Setelah identifikasi isu strategis, perangkat daerah menetapkan prioritas program dan kegiatan yang akan diusulkan dalam Renja PD. Prioritas ini ditentukan berdasarkan urgensi dan dampak yang diharapkan dari pelaksanaan program tersebut, serta kesesuaian dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang, baik di tingkat daerah maupun nasional. Dalam proses ini, keterlibatan pemangku kepentingan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, sangat penting untuk memastikan program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

Tahap terakhir adalah penyusunan draft Renja PD yang memuat rencana program, kegiatan, serta alokasi anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Draft Renja PD ini kemudian dibahas dalam forum konsultasi publik, forum perangkat daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebelum disahkan. Proses konsultasi ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak agar dokumen Renja PD yang dihasilkan benar-benar representatif dan dapat diimplementasikan dengan baik.

Renja Perangkat Daerah memiliki keterkaitan erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat daerah maupun nasional. Salah satu dokumen utama yang menjadi acuan dalam penyusunan Renja PD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Renja PD harus selaras dengan RKPD untuk memastikan bahwa program dan kegiatan di tingkat perangkat daerah mendukung prioritas pembangunan daerah secara keseluruhan. Selain itu, Renja PD juga terkait dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode lima tahun. Renstra PD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi yang akan ditempuh oleh perangkat daerah untuk mencapai target pembangunan yang ditetapkan. Renja PD merupakan penjabaran tahunan dari Renstra PD, sehingga program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja PD harus konsisten dengan arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra PD.

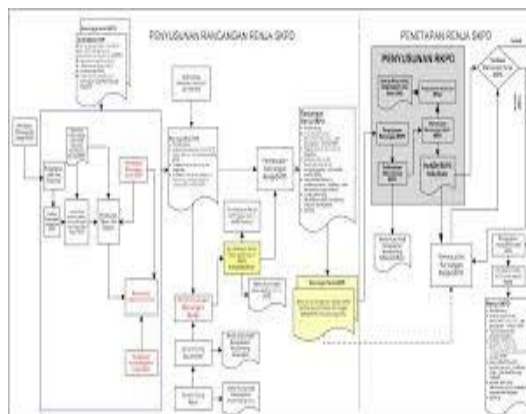
Tidak hanya itu, Renja PD juga harus mempertimbangkan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional, seperti Renja Kementerian/Lembaga (K/L), serta perencanaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini penting terutama untuk program-program yang melibatkan kerjasama antar-pemerintah daerah atau memerlukan sinergi dengan kebijakan nasional. Dengan demikian, penyusunan Renja PD harus mempertimbangkan berbagai aspek kebijakan, baik yang bersifat lokal maupun nasional, untuk memastikan kesinambungan dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan.

Keterkaitan Renja PD dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya mencerminkan pentingnya koordinasi dan sinergi antar-tahapan dan tingkat perencanaan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih program dan kegiatan serta untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya dapat digunakan secara optimal. Sinergi yang baik antara Renja PD dan dokumen perencanaan lainnya diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Tahap terakhir adalah penyusunan draft Renja PD yang memuat rencana program, kegiatan, serta alokasi anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Draft Renja PD Perubahan ini kemudian dibahas dalam forum konsultasi publik, forum perangkat daerah (OPD), serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebelum disahkan. Proses konsultasi ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak agar dokumen Renja PD yang dihasilkan benar-benar representatif dan dapat diimplementasikan dengan baik.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) adalah sebagaimana tercantum dalam gambar di bawah ini :

Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan RENJA PD





Renja Perangkat Daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, seperti RPJMD, RKPD, dan Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah. Renja menjadi dokumen operasional tahunan yang menguraikan secara lebih rinci mengenai program dan kegiatan yang sudah diidentifikasi dalam Renstra. Dengan demikian, Renja menjadi instrumen untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan Renstra, yang memiliki jangka waktu lima tahun, berjalan sesuai target.

Selain itu, Renja juga menjadi salah satu acuan utama dalam penyusunan RKPD, di mana RKPD mengakomodasi semua Renja dari seluruh perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Proses ini menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara Renja dengan RPJMD dan RKPD sebagai instrumen perencanaan yang lebih makro. Keterkaitan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan di tingkat Dinas berjalan sejalan dengan visi besar pembangunan daerah secara keseluruhan.

a. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan disusun dengan mengacu pada visi dan misi jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029.

RPJMD menetapkan arah pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan, dan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan merupakan salah satu instrumen implementasi tahunan yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Dalam RPJMD, telah ditetapkan sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai pada akhir periode lima tahun. Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan merinci sasaran dan indikator ini ke dalam target-target tahunan yang lebih operasional. RPJMD memuat program prioritas dan strategi pembangunan yang mencakup berbagai sektor penting untuk kemajuan daerah. Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dirancang untuk mendukung program prioritas ini melalui kegiatan yang spesifik dan terukur. Salah satu aspek penting dalam keterkaitan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan RPJMD adalah penyelarasan anggaran. RPJMD mengarahkan alokasi sumber daya ke sektor-sektor prioritas dan Renja ini memastikan penggunaan anggaran yang sesuai dengan arah kebijakan tersebut. Dengan mengarahkan anggaran pada program yang mendukung sasaran RPJMD, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dapat berkontribusi secara efektif terhadap pencapaian target jangka menengah, sekaligus memastikan bahwa anggaran yang digunakan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.



b. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan merupakan implementasi dari visi dan misi RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026, yang bertujuan untuk mendorong pembangunan daerah secara menyeluruh. Misalnya, jika RKPD menitikberatkan pada peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik, Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan akan menyelaraskan program-programnya untuk mendukung pencapaian tersebut. Oleh karena itu, Renja ini disusun dengan memperhatikan prioritas utama pemerintah daerah, memastikan sinergi antara tujuan spesifik dinas dan arah pembangunan kabupaten.

Sasaran strategis yang terdapat dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 memberikan panduan bagi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk menetapkan sasaran operasional dalam Renja. Dalam konteks ini, Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan diarahkan untuk mencapai target yang lebih rinci dan spesifik guna mendukung sasaran jangka menengah RKPD. Program prioritas dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 menjadi acuan utama bagi Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk merancang kegiatan yang berfokus pada hasil yang berdampak langsung bagi masyarakat. Sebagai contoh, apabila RKPD memiliki prioritas dalam bidang kesejahteraan rakyat, maka Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan akan mencakup program seperti Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, Program perekonomian dan pembangunan, Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang target indikatornya menunjang pencapaian prioritas RKPD. Dengan demikian, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dapat memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan benar-benar mendukung prioritas pemerintah daerah.

Dalam penyusunan Renja, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan juga perlu memperhatikan pengalokasian anggaran agar sejalan dengan kemampuan keuangan daerah yang tercantum dalam RKPD. Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan didesain untuk mengoptimalkan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan fokus pada kegiatan yang mendukung program prioritas RKPD. Sinergi antara Renja dan RKPD dalam hal pengalokasian anggaran ini memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.



c. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, dan sasaran kinerja yang ingin dicapai oleh dinas selama periode lima tahun. Sementara itu, Renja adalah rencana tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra, memuat program, kegiatan, dan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa Renja merupakan pelaksanaan konkret dari arah kebijakan yang sudah ditetapkan dalam Renstra.

Dalam proses perencanaan, Renja harus disusun dengan mengacu pada Renstra agar program dan kegiatan tahunan yang direncanakan dapat selaras dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Hal ini memastikan bahwa kegiatan tahunan yang dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tidak hanya bersifat rutinitas, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi dan misi jangka menengah. Dalam konteks Kabupaten Padang Pariaman, ini berarti Renstra tahun 2025-2029 harus selaras dengan visi pembangunan daerah, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan infrastruktur daerah.

Selain itu, keterkaitan antara Renja dan Renstra juga terlihat dari penggunaan indikator kinerja yang konsisten. Renstra menetapkan target kinerja jangka menengah yang kemudian diukur secara tahunan melalui Renja. Dengan demikian, Renja juga berfungsi sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian kinerja dinas dalam jangka pendek, sehingga dinas dapat menyesuaikan strategi atau program tahunan sesuai dengan capaian yang diperoleh dari tahun sebelumnya. Terakhir, sinkronisasi antara Renja dan Renstra juga penting untuk memastikan alokasi anggaran yang tepat dan efisien. Anggaran yang dialokasikan dalam Renja harus mendukung prioritas yang ditetapkan dalam Renstra, sehingga setiap kegiatan yang direncanakan dapat memberikan dampak maksimal terhadap pencapaian tujuan strategis dinas dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Hal ini juga membantu dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dinas di Kabupaten Padang Pariaman Renja Perangkat Daerah tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Dalam proses penyusunan RAPBD, program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja PD menjadi acuan untuk menentukan prioritas pendanaan. Hal ini penting karena anggaran



yang dialokasikan dalam RAPBD harus mencerminkan kebutuhan riil perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan. Proses penyusunan RAPBD diawali dengan pembahasan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Renja PD di tingkat perangkat daerah. Program yang telah diidentifikasi sebagai prioritas dalam Renja PD.

1.2. Landasan Hukum

Yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4) Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 696868);
- 5) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);



- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 9) Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
- 10) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9);
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);



RENCANA KERJA 2026

- 16) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 17) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
- 18) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4);
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor 5);
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6).
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman 2021-2026;
- 23) Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
- 24) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
- 25) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
- 26) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
- 27) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
- 28) Peraturan ANRI No. 1 Tahun 2023: tentang Pedoman Autentikasi Arsip Statis
- 29) Peraturan ANRI No. 5 Tahun 2025: tentang Jenis Naskah Dinas



- 30) Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Umum
- 31) Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan disusun untuk memenuhi maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Disamping untuk memberikan gambaran tentang program kegiatan pembangunan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2025 guna mencapai sasaran pembangunan dengan memperhatikan dan menganalisis lingkungan strategis internal maupun eksternal.

Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah :

- 1) Untuk memberikan pedoman dan arahan dan penyelarasan program dan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
- 2) Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan;
- 3) Menyelaraskan program dan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan Rencana Pembangunan daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; dan
- 4) Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Perubahan tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;



- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PERANGKAT DAERAH dan
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- 2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

- 3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub Bab ini, antara lain:

- 1) Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- 2) Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1** Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

- 3.2** Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Perubahan

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

- 3.3** Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- 1) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- 2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a) Jumlah program dan jumlah kegiatan.



RENCANA KERJA 2026

- b) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
- c) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- 3) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- 1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- 3) Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun lalu, pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah mengalami berbagai dinamika yang mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan. Secara umum, evaluasi menunjukkan bahwa beberapa program berhasil dilaksanakan dengan baik, sementara ada pula yang mengalami kendala. Penilaian ini dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya, sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Dalam banyak hal, kolaborasi antar unit kerja menjadi faktor penting dalam mencapai hasil yang diharapkan, meskipun terdapat tantangan dalam koordinasi dan komunikasi.

Capaian Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah juga menjadi sorotan dalam evaluasi ini. Terdapat beberapa program prioritas yang telah mencapai atau bahkan melampaui target yang ditetapkan, terutama dalam hal peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, masih ada sejumlah indikator yang belum optimal, menunjukkan perlunya penguatan strategi dan sumber daya. Pelaksanaan Renja PD yang sejalan dengan Renstra sangat penting untuk memastikan bahwa visi dan misi daerah dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Dalam upaya meningkatkan kinerja ke depannya, evaluasi ini memberikan rekomendasi untuk menyusun program kerja yang lebih terintegrasi dan berbasis data. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi menjadi langkah strategis yang harus diambil. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan Renja PD dan capaian Renstra perangkat daerah di masa mendatang dapat lebih baik, serta mampu menjawab tantangan pembangunan yang dihadapi.

Sebagaimana ditetapkan dalam APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 dan DPA Tahun 2025. Total realisasi belanja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam tahun anggaran 2025 tercatat sebesar Rp4.108.107.936,00. Jumlah tersebut mencapai 95,70% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp4.393.993.350,00. Meskipun realisasi seluruh komponen belanja daerah berada dibawah anggaran namun sudah memenuhi prinsip 3E. Realisasi belanja



RENCANA KERJA 2026

pegawai sebesar Rp2.911.665.383,00 atau 95,33%, realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp1.017.457.753,00 atau 87,69%, dan realisasi belanja modal sebesar Rp178.984.800,00 atau 99,71% dari jumlah anggarannya.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (2024) berdasarkan target indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut:

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada renstra;

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PENCAPAIAN KINERJA			ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN	
		TARGET	REALISASI	SATUAN		(RP)	(%)
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	3,50	51	Rasio	90.145.000,00	87.696.500,00	97,28%
		.0,85	12.86	%			
		21.482.	57.523	Jumlah			
		0.20	0.3	Rasio			
		0.40	14.60	%			
		0.50	1.15	%			
	Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25	14	Jumlah	57.145.000,00	54.853.500,00	95,99%
		800	1.700	Eksemplar			
		1500	5.760	Jumlah			
		8	7	Jumlah			
1	Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik	50	6	Pustaka	25.845.000,00.	24.482.600,00	94.73%
2	Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar diseluruh wilayah kabupaten /kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan	34	13	Pustaka	31.300.000,00	30.370.900,00	97,03%
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16	16	Jumlah	33.000.000,00	32.843.000,00	99,52%
		350	350	Jumlah			
1	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17	14	Peserta	33.000.000,00	32.843.000,00	99,52%
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	100	100	%	37.929.805,00	24.415.000,00	64,37%
	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	20	10	Naskah Kuno	37.929.805,00	24.415.000,00	64,37%
1	Pengembangan, Pengolah, Pengalihmediaan Naskah kuno yang	20	10	Naskah Kuno	37.929.805,00	24.415.000,00	64,37%



RENCANA KERJA 2026

	dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan						
1	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	55	55.29	%	10.214.000,00	4.251.600,00	41,63%
		45	47,65	%			
	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	5	0	Jumlah	10.214.000,00	4.251.600,00	41,63%
		10	0	%			
	Penilaian dan Penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun.	10	0	JRA	10.214.000,00	4.251.600,00	41,63%

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PENCAPAIAN KINERJA			ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN	
		TARGET	REALISASI	SATUAN		(RP)	(%)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	100	%	3.365.910.190,00	3.150.732.827,00	93,61%
		A	A	A			
		100	100	%			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	%	44.755.000,00	39.903.00,00	89,15%
		100	100	%			
1	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	4	4	Dokumen	23.000.000,00	19.613.000,00	85,27%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	10	Dokumen	22.755.000,00	20.290.000,00	89,17%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	%	3.055.199.510,00	2.914.565.383,00	95,40%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1	1	Tahun	2.969.334.510,00	2.828.805.383,00	95,27%
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	Tahun	80.835.000,00	80.820.000,00	99,98%
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	1	1	Dokumen	4.950.000,00	4.940.000,00	99,80%



RENCANA KERJA 2026

	Kuangan Akhir Tahun SKPD						
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	%	66.931.840,00	51.987.210,00	77,67%
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	1 Tahun	Tahun	66.931.840,00	51.987.210,00	77,67%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	%	199.023.840,00	180.189.934,00	90,54%
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	1 Tahun	Tahun	48.000.000,00	29.379.934,00	61,21%
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun	1 Tahun	Tahun	151.023.840,00	150.810.000,00	99,86%
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	3,50	51	Rasio	827.079.447,00	749.357.809,00	90,60%
		.0,85	12.86	%			
		21.482.	57.523	Jumlah			
		0.20	0.3	Rasio			
		0.40	14.60	%			
		0.50	1.15	%			
	Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25	14	Jumlah	688.045.247,00	615.578.392,00	89,47%
		800	1.700	Eksemplar			
		1500	5.760	Jumlah			
		8	7	Jumlah			
1	Pengembangan perpustakaan di tingkat daerah kabupaten/kota	1 dan 50	1 dan 50	Pustaka dan Lokasi	471.585.247,00	406.714.392,00	86,24%
2	Pengembangan Bahan Pustaka	500	500	Eksemplar	176.500.000,00	174.359.800,00	98,79%
3	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	1	Dokumen	39.960.000,00	34.504.200,00	86,35%
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16	16	Jumlah	139.034.200,00	133.779.417,00	96,22%
		350	350	Jumlah			
1	Pemberian penghargaan gerakan budaya membaca	74	74	Peserta	83.000.000,00	81.446.539,00	98,13%
2	Pengembangan Literasi berbasis inklusi sosial	152	152	Peserta	56.034.200,00	52.332.878,00	93,39%
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	68.50	68.50	%	9.589.160,00	9.468.500,00	98,74%
		20.95	20.95	%			
		85	20.95	%	9.589.160,00	9.468.500,00	98,74%



RENCANA KERJA 2026

	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	50	0	%			
		50	0	%			
1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	25	25	OPD	9.589.160,00	9.468.500,00	98,74%

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PENCAPAIAN KINERJA			ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN	
		TARGET	REALISASI	SATUAN		(RP)	(%)
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	3,50	51	Rasio	50.000.000,00	45.322.200,00	90,64%
		.0,85	12.86	%			
		21.482.	57.523	Jumlah			
		0.20	0.3	Rasio			
		0.40	14.60	%			
		0.50	1.15	%			
	Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25	14	Jumlah	25.000.000,00	24.572.200,00	98,29%
		800	1.700	Eksemplar			
		1500	5.760	Jumlah			
1	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	500	1100	Eksemplar	25.000.000,00	24.572.200,00	98,29%
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16	16	Jumlah	25.000.000,00	20.750.000,00	83,00%
		350	350	Jumlah			
1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta Masyarakat	50	68	Peserta	25.000.000,00	20.750.000,00	83,00%
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	55	55.29	%	7.360.000,00	7.279.000,00	98.90%
		45	47,65	%			
	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	25	12	Nagari	7.360.000,00	7.279.000,00	98.90%
1	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	100	154	Arsip	7.360.000,00	7.279.000,00	98.90%



--	--	--	--	--	--	--	--

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Secara keseluruhan capaian realisasi program/kegiatan/sub kegiatan memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :

- Tidak adanya ketersediaan anggaran, di haruskan kegiatan tersebut tidak dilaksanakan seperti kegiatan-kegiatan pada urusan kearsipan.
- Dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang indikator nya belum sesuai dengan yang di jalankan sehingga tidak optimalnya capaian target yang di jalankan oleh bidang tersebut.
- adanya kegiatan yang tidak optimal capaian targetnya dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran sehingga target yang ditetapkan di awal tahun tidak tercapai.

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Dinas Kearsipann dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman sangat signifikan ketika Rencana Kerja (Renja) PD disusun selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas. Pertama, keselarasan ini memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memiliki arah yang jelas dan tujuan yang terukur, sehingga meningkatkan efektivitas dalam pencapaian target. Dengan mengikuti pedoman strategis yang telah ditetapkan, Dinas dapat fokus pada prioritas utama yang mendukung visi dan misi jangka menengah, mengurangi risiko penyimpangan dari tujuan awal. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagai berikut :

- Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2025 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya.
- Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2.1.6 Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut di antaranya:

- Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pihak-pihak yang terkait dalam proses perencanaan program dan kegiatan agar permasalahan yang timbul dalam tahap pelaksanaannya nanti dapat diminimalisir.



RENCANA KERJA 2026

- b. Mempertimbangkan dengan baik hasil monitoring dan evaluasi ataupun target pencapaian program/kegiatan yang rasional dan sesuai dengan kebutuhan pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan.
- c. Penyusunan Rencana Aksi yang Lebih Detail dan Terfokus Kebijakan perencanaan harus dimulai dengan penyusunan rencana aksi yang lebih detail, mencakup target antara, jadwal kegiatan, dan indikator kinerja yang lebih terperinci untuk tahun 2026.
- d. Melakukan peninjauan ulang terhadap prioritas program. Program yang kurang strategis atau tidak mendesak mungkin perlu ditunda atau dialihkan dan difokuskan pada program-program yang lebih berkontribusi terhadap capaian target Renstra. Ini membutuhkan analisis mendalam mengenai dampak setiap program terhadap pencapaian visi dan misi, serta kemampuan program tersebut untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi eksternal. Dengan menyesuaikan prioritas, Dinas bisa lebih fokus pada program yang paling penting untuk mencapai target 2026.
- e. Melakukan re-alokasi anggaran jika terdapat program-program yang kurang efektif atau sudah tidak sesuai dengan prioritas. Sumber daya harus diarahkan untuk mendukung program yang lebih prioritas dan mendesak dalam mencapai target Renstra. Selain itu, penganggaran yang lebih efisien harus dilakukan melalui evaluasi rutin terhadap penggunaan anggaran di tahun-tahun sebelumnya, untuk menghindari pemborosan dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan memiliki dampak maksimal. Strategi optimalisasi anggaran ini dapat mencakup penghematan di pos-pos tertentu, peningkatan kapasitas SDM, atau pemanfaatan teknologi yang lebih canggih untuk mendukung pelaksanaan program.



RENCANA KERJA 2026

Tabel 2.1 (TC.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2025 Kabupaten Padang Pariaman
Periode Pelaksanaan: 2025

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)RENSTRA/Kegiatan (output) RENJA	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 s.d 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu (n-4) Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-2) yang dievaluasi Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggran renja tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 sd 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Pengguna Jawab	
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 *100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
I		Program Pembinaan Perpustakaan	1. Rasio ketercukupan koleksi dengan populasi	3,8	875.485.000	50,9	193.665.300	95,3	770.190.247	0	23.836.600	0	41.434.250	25,9	1.132.494.199	25	456.538.698	50,9	1.654.303.747	53	215	101,8	1.847.969.047,0	267,8,9	211%	



RENCANA KERJA 2026

			2. Persenta se jumlah kunjung an masyara kat ke Perpusta kaan,	1		0 , 3 7	-	3		3 6		4 3		4 8		5 1		1 7 8		5.93 3		1 7 8, 3 7		1 7 8 3 7			
			3. Persenta se anggota perpusta kaan	3, 5		5 , 6	-	0, 5		2 6 3		5 5 9		8 5 3		1 1 5 4		2 8 2 9		565. 800		2 8 3 4, 6		8 0 9 8 9			
			4. Rasio ketercuk upan tenaga perpusta kaan,	2 5		0 , 0 4	-	0, 2		0 , 2		0 , 2		0 , 2		0 , 2		0, 8		400		0, 8 4		3, 3 6			
			5. Persenta se perpusta kaan sesuai SNP,	2 5		1 , 6 1	-	0, 4		5 , 7		7 , 2		1 1 , 8 4		1 4 , 6		3 9, 3 4		9.83 5		4 0, 9 5		1 6 3, 8			
			6. Persenta se kemanfa atan perpusta kaan oleh masyara kat	2 5																							
1		Pengelo laan Perpust akaan Tingkat Daerah Kabupa ten/ Kota	1.Jumla h perpusta kaan umum yang menggun akan aplikasi berbasis IT	4 0		5 7 , 5	104.272. 050	30		0		2 3 , 3 3		3 4 , 1 7		0		5 7, 5		1.499.77 4.330		192	205	1 1 5	1.604.046 .380	2 8 7, 5	2 9 3 %
			2. Jumlah koleksi bahan pustaka	1 5		1 5	-	50		4 9 , 5		4 9 , 5		4 9 , 5		4 9 , 5		1 9 8		396		2 1 3		1 4 2 0			



RENCANA KERJA 2026

			3. Jumlah kunjungan pemustaka ke perpustakaan	226410	0,06	-	100000	2500	2500	2500	2500	2500	10000	0	10000	0	10000	4,4168		
			4. Jumlah Perpustakaan yang sesuai standar Nasional Perpustakaan	52	6	-	10	0	0	0	0	5	5	50	11	21,154				
		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	240	175.500.000	40	24.052.950	25.845.000	1.390.600	-	130.552.400	19.382.000	7	151.325.000	47	586	47	175.377.950	19,583	100%	
		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di	300	175.000.000	60	23.694.600	471.585.247	18.006.000	30.508.750	931.997.150	173.307.430	50	1.153.819.330	100	245	110	1.177.513.930	36,667	673%	



Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman



RENCANA KERJA 2026

		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	2400	100.000.000	260	6.912.900	25.000.000	0	50	2.978.500	3.463.000	21.593.700	260	28.035.200	52	112	520	34.948.100	21,667	35%
		Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100				2.170.000				4.390.000									
2		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah penghargaan kegemaran membaca	20	328.075.000	25	89.393.250	39.960.000	3.960.000	25	7.947.000	48.954.649	93.667.768	25	154.529.417	208	387	50	243.922.667	250	74%



RENCANA KERJA 2026

			2. Jumlah pelibatan kegiatan masyara kat di Perpusta kaan wilayah Kabupat en Padang Pariama n	5 0 0 0		2 5	-	80 0		0		0		0	2 5		2 5		3		5 0		1		
		Sosialis asi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidi kan Dasar dan Pendidi kan khusus serta Masyar akat	Jumlah Lokus Pembuda yaan Kegemar an Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidik an	2 5 0		150. 000. 000	6 8	29.924.0 00		1	25.000.0 00	3.960.00 0	7.947.00 0	8.843.000	0	-	1	20.750.0 00	100	83	6 9	50.674.00 0	2 7, 6	3 4 %	
		Pemberi an Pengha rgaan Geraka n Budaya Gemar Membra ca	Jumlah Orang yang Mendapa tкан Pengharg aan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupat en Kota	2 0 4		149. 925. 000	3 4	24.867.6 50		16	83.000.0 00	-	-	24.709.439	0	56.737.100	1 6	81.446.5 39	100	98	5 0	106.314.1 89	2 4, 5 1	7 1 %	
		Pengem banan Literasi Berbasi s Inklusi Sosial	Jumlah Perpusta kaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupat en/Kota	3 0 0		178. 150. 000	1 7 3	34.601.6 00		25	56.034.2 00	-	-	15.402.210	0	36.930.668	2 5	52.332.8 78	100	93	1 9 8	86.934.47 8	6 6	4 9 %	

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman



Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman



Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman



Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman



RENCANA KERJA 2026

2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang-undangan	100	16.197.598.328	100	2.710.859.945	3.379.804.124	1.038.166.328	760.979.085	423.240.354	692.179.616	100	2.914.565.383	86	200	5.625.425.328	200	35%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84	15.601.358.328	14	2.610.848.945	3.283.969.124	1.007.166.328	752.459.085	402.150.354	667.029.616	100	2.828.805.383	86	28	5.439.654.328	33,33%	35%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72	446.240.000	12	83.040.000	80.835.000	27.550.000	7.030.000	21.090.000	25.150.000	100	80.820.000	100	24	163.860.000	33,33%	37%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	150.000.000	1	16.971.000	15.000.000	3.450.000	1.490.000	-	-	100	4.940.000	33	2	21.911.000	33,33%	15%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai	100	175.000.000	85	16.740.000	-	-	-	-	-	85	-	#DIV/0!	170	16.740.000	170	10%



Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman



Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman



RENCANA KERJA 2026

		Dinas Jabatan																						
6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia	100	1.662.122.000	12	219.182.190	174.023.840	59.858.286	18.016.060	40.994.227	3	61.321.361	12	180.189.934	100	104	24	399.372.124	24	24%			
			2. Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan																					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72	156.429.000	12	15.914.000	-	-	-	-	3	-	12	-	100	#DIV/0!	24	15.914.000	333	10%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	267.800.000	14	16.570.790	23.000.000	9.723.286	5.313.560	3.494.227	3	10.848.861	12	29.379.934	86	128	112	45.950.724	1556	17%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	1.237.893.000	1	186.697.400	151.023.840	50.135.000	12.702.500	37.500.000	3	50.472.500	12	150.810.000	120	100	13	337.507.400	18056	27%			



RENCANA KERJA 2026

7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	1.072.674.000	75	1.729.652.917	100	-	25	-	25	-	25	-	75	-	75	#DIV/0!	150	1.729.652.917	150	161%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara, pajak kendaraan dinas, bahan bakar minyak yang dibayarkan	16	736.497.000	9	90.431.345	3	-	3	-	3	-	3	-	9	-	300	#DIV/0!	18	90.431.345	112,5	12%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan operasional perpustakaan/perpustakaan yang terpelihara, pajak kendaraan dinas, bahan bakar minyak yang	12	109.340.000	2	16.480.000	2	-	0	-	2	-	0	-	2	-	100	#DIV/0!	4	16.480.000	33,33	15%



RENCANA KERJA 2026

		atau Lapangan	dibayarkan																					
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah ketersediaan jasa perbaikan peralatan kerja	72	59.995.000	9	12.758.410	12	-	3	-	3	-	3	-	-	9	-	75	#DIV/0!	18	12.758.410	25	21%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan akan	72	166.842.000	6	1.609.983.162	12	-	0	-	3	-	3	-	-	6	-	50	#DIV/0!	12	1.609.983.162	16,667	965%
						0	-													0				
I	V	Program Pengelolaan Arsip	1. Personase aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	70	781.270.000	70	83.120.651	60,95	9.589.160	0		0		0		-	70	12.954.550	115	135	140	96.075.201	200	12%
			2. Personase PD yang memiliki Laporan Audit Kearsipan Internal yang Baik	23,25		12	-	18,6		0		0		12			12		65		24		103,23	
															0									



RENCANA KERJA 2026

1	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Peringkat Daerah yang menerapkan sistem kearsipan yang baku	85	587.120.000	37	47.217.500	85	9.589.160	0	9.468.500	0	5.192.000	25	-	12	-	37	14.660.500	44	153	74	61.878.000	87,059	11%
		2. Persentase pengelola Kearsipan yang menguasai Pengelola an, Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	50		25	-	50		0		0		0		25		25		50		50		100	
		3. Persentase peningkatan peserta bimtek yang lulus ujian sertifikasi	50		25	-	50		0		0		0		25		25		50		50		100	
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah OPD yang dibangun dalam pengelolaan penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	240	206.300.000	25	29.752.500	25	9.589.160	26	9.468.500	0	3.400.000	25	-	0	-	51	12.868.500	204	134	76	42.621.000	31,667	21%



Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman



RENCANA KERJA 2026

3		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan layanan SIKN/JIKN	15	194.150.000	0	14.846.844	10	-	0	-	0	7.762.550	-	0	7.762.550	-	#DIV/0!	0	22.609.394	0	12%	
		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	25	194.150.000	0	14.846.844	2	-	0	-	0	7.762.550	-	0	7.762.550	-	#DIV/0!	0	22.609.394	0	12%	
						0	-												0				
V		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	1.Persentase Peningkatan Arsip Statis yang terselamatkan	70	716.998.000	58,52	99.649.746	55	17.574.000	0		0	1.328.800	58,52	-	58,52	1.328.800	106	8	117,04	100.978.546	167,2	14%
			2. Persentase Peningkatan Arsip daerah yang alih	70		70	-	45		0		0		70		70		156		140		200	



RENCANA KERJA 2026

			mediaka n																						
1		Pemus nahan Arsip Dilingk ungan Pemer ntah Daerah Kabupa ten/Kot a yang Memilik i Retensi di Bawah 10 (sepulu h) Tahun	1. Jumlah Peratura n Bupati tentang Kearsipa n	3 0		194. 525. 000	1	22.935.9 00	5	10.214.0 00	1 0	-	1.328.80 0	1	-	0	1 1	1.328.80 0	220	13	1 2	24.264.70 0	4 0	1 2 %	
			2.Persent ase Pemusna han Arsip yang sesuai NSPK	1 0		0		-	7		0		0	0		0	0	-		0		0	0		
		Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah JRA yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati	6 0		194. 525. 000	1 0	22.935.9 00	10	10.214.0 00	1 0	-	1.328.80 0	0	-	0	2 0	1.328.80 0	200	13	3 0	24.264.70 0	5 0	1 2 %	



RENCANA KERJA 2026

2	Penyela matan Arsip Perang kat Daerah Kabupa ten/Kot a yang Digabu ng dan/at au Dibuba rkan, dan Pemeka ran Daerah Kecama tan dan Desa/K eluraha n	Jumlah Pembina an, Pengawa san dan Pengemb angan Pengelola an Kearsipa n dan Perpusta kaan	1 5 0	178. 895. 000	2 5	28.275.0 00	10	7.360.00 0	2 5	-	0	-	2 5	-	0	-	5 0	-	500	-	7 5	28.275.00 0	5 0	1 6 %
	Penda mpinga n Penyela matan Arsip bagi Pemeka ran Desa/K eluraha n	Jumlah Nagari Pemekar an yang dibina tata kelola kearsipa nnya	1 5 0	178. 895. 000	2 5	28.275.0 00	25	7.360.00 0	2 5	-	0	-	0	-	0	-	2 5	-	100	-	5 0	28.275.00 0	3 3, 3 3 3	1 6 %
3	Autenti kasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupa ten/Kot a	Jumlah Autentik asi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupat en/Kota yang sesuai NSPK	2 4 5 0	343. 578. 000	1 3 5	48.438.8 46	35 0	-	0	-	0	-	1 3 5	-	0	-	1 3 5	-	39	#DIV/0!	2 7 0	48.438.84 6	1 1, 0 2	1 4 %



RENCANA KERJA 2026

		Penilaian dan Penetapan Autentitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Keberadaan dan Keutuhan Arsip yang sesuai NSPK	300	148.240.000	81	23.086.196	50	-	0	-	0	-	2	-	79	-	81	-	162	#DIV/0!	162	23.086.196	54	16%
		Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah arsip yang dialih mediakan	2150	195.338.000	400	25.352.650	300	-	0	-	0	-	350	-	50	-	400	-	133	#DIV/0!	800	25.352.650	37,209	13%
						0	-											0							
V	i	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di Lembaga Kearsipan	25	125.000.000	1	22.081.000	0	-	0	-	0	-	1	-	0	-	1	-	-	#DIV/0!	2	22.081.000	8	18%



RENCANA KERJA 2026

		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Persentase Penyusunan SOP Kearsipan	25	125.000.000	0	22.081.000	-	-	-	-	-	0	-	-	-	#DIV/0!	0	22.081.000	0	18%
		Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup yang disusun	25	125.000.000	0	22.081.000	-	-	-	-	-	0	-	-	-	#DIV/0!	0	22.081.000	0	18%
						0	-						0								

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah berkewajiban untuk menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah, menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan, dan menyelenggarakan serta mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya. Sementara Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyebutkan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara/ pemerintahan daerah, menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah, menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator- indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan kinerja utama. Pengukuran capaian kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis.

Adapun capaian Kinerja Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan Arsip tahun 2025-2029 dapat kita lihat pada table berikut ini :



RENCANA KERJA 2026



RENCANA KERJA 2026

Tabel TC 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2026			Tahun 2027			Tahun 2028			Tahun 2029			Tahun 2030		
		Tar get	Real isasi	%	Tar get	Real isasi	%	Tar get	Real isasi	%	Tar get	Real isasi	%	Tar get	Real isasi	%	Tar get	Real isasi	%
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Meningkatnya Layanan Kearsipan	Persentase dokumen arsip dalam bentuk digital	20	20	100	23			25			30			35			35		
Meningkatnya Kualitas SDM	Persentase pustakawan dan arsiparis yang bersertifikat	15	15	100	20			20			25			25			25		
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	78	79,20	101,54	79,5			80			80,5			81			81		



RENCANA KERJA 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2026			Tahun 2027			Tahun 2028			Tahun 2029			Tahun 2030		
		Tar get	Real isasi	%	Tar get	Real isasi	%	Tar get	Real isasi	%	Tar get	Real isasi	%	Tar get	Real isasi	%	Tar get	Real isasi	%
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Meningkatnya kualitas layanan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca Masyarakat	70	56,74	81,06	70,5			71			71,5			72			72		

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025 : (sesuaikan dengan laporan LAKIP)

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perpustakaan



Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan perpustakaan merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitas atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan perpustakaan dari publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. Menurut Kepmen PAN No. 25 Tahun 2004 tentang indeks kepuasan masyarakat, ada 14 (empat belas) hal yang berkaitan dengan kinerja dan pelayanan yang dilakukan oleh petugas pelayanan, antara lain prosedur pelayanan, kesesuaian persyaratan, keberadaan/kejelasan petugas, kedisiplinan petugas, tanggung jawab petugas, kemampuan petugas, kecepatan pelayanan, keadilan pelayanan, kesopanan petugas, kewajaran biaya, kepastian biaya, kepastian jadwal, kenyamanan lingkungan dan keamanan pelayanan.

Jadi dengan adanya indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perpustakaan, maka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dapat mengukur kinerja layanan perpustakaan setiap tahunnya. Untuk itu indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perpustakaan menjadi sasaran strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam meningkatkan pelayanan perpustakaan di lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Padang Pariaman.

Indeks kepuasan masyarakat layanan kepustakaan pada tahun 2025 realisasinya sebesar 97,5% dengan persentase capaian 97,5% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Terjadi sedikit penurunan capaian kinerja pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kepustakaan pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024. Adanya berbagai faktor yang menyebabkan penurunan kinerja pada indikator ini adalah pengurangan anggaran urusan perpustakaan dan keterbatasan SDM untuk melakukan pelayanan perpustakaan kepada pengunjung perpustakaan.

Walaupun indikator ini tidak memenuhi target yang ditetapkan namun capaian 97,5% dikategorikan dengan interpretasi Berhasil. Karena capaian kinerja sudah berada di angka 97,5%. Meski adanya pengurangan anggaran urusan perpustakaan pada tahun 2025 namun komitmen kerja dari pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan khususnya bidang perpustakaan dalam

hal meningkatkan kepuasan layanan Perpustakaan tetap tinggi sehingga interprestasi Berhasil dapat dicapai pada tahun 2025.

Capaian kinerja tersebut didukung oleh program Pembinaan Perpustakaan kegiatan Pengelolaan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik, Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka, Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial serta Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestrasikan dan didayagunakan dimana secara umum output dari masing-masing sub kegiatan tersebut adalah untuk melengkapi sarana dan prasarana layanan perpustakaan yang ada di Perpustakaan Umum Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan Nilai Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan di lingkungan Kab. Padang Pariaman.

Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat



Membaca pada dasarnya adalah untuk memperoleh pengetahuan dan informasi untuk meningkatkan kualitas hidup setiap orang. Membaca sudah menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi dari kehidupan sehari-hari. Kegiatan membaca harus ditumbuhkembangkan sejak usia dini dalam lingkungan keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2007 tentang perpustakaan menyebutkan bahwa perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Dalam konteks ini, peningkatan minat baca masyarakat berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan dalam meningkatkan kualitas hidupnya.

Tingkat kegemaran membaca masyarakat bertujuan untuk melihat sejauh mana minat, kebiasaan, dan akses masyarakat terhadap aktivitas membaca. TGM ini digunakan oleh Perpustakaan untuk menggambarkan kondisi kegemaran membaca masyarakat pada tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/ kota. Komponen pengukuran Tingkat Kegemaran Membaca terdiri dari dimensi pra membaca, saat membaca dan pasca membaca dengan masing-masing bobot untuk Pra membaca 15%, Saat membaca 50% dan Pasca membaca 35%.

Indeks Kearsipan (ANRI)

Nilai indeks pengelola arsip eksternal (LAKE) merupakan program pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap tata kelola kearsipan secara nasional. Kegiatan ini mulai dilaksanakan oleh pemerintah pusat pada tahun 2017 sampai pada saat sekarang ini. ANRI melakukan penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional (LHPKN) berdasarkan LAKE dan LAKI paling lambat pada 30 november setiap tahun anggaran.

Adapun bentuk instrument audit kearsipan antara lain ; formulir audit kearsipan, wawancara dan verifikasi lapangan. Tim pengawas kearsipan memberikan nilai atas hasil pengawasan kearsipan yang dituangkan dalam LAKE dan LAKI dengan predikat nilai buruk, kurang, cukup, baik, sangat baik. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. Sumbar melakukan penilaian kepada Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kabupaten/ Kota di lingkungan Prov. Sumbar. LKD Prov. Sumbar akan langsung di nilai oleh Arsip Nasional Republik Indonesia setiap tahunnya.

Nilai LAKE ini merupakan salah satu indikator Reformasi Birokrasi dari Kemenpan-RB Republik Indonesia. Agar Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan penghargaan Reformasi Birokrasi tentunya nilai LAKE Kabupaten Padang Pariaman harus mendapatkan predikat sangat baik dari Arsip Nasional Republik Indonesia.

Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Dinas Kearsipan & Perpustakaan dari Inspektorat

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatnya kapasitas serta akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Guna mengetahui sejauh mana Perangkat Daerah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong Perangkat Daerah agar secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansi nya sesuai yang diamanatkan dalam RPJMD.



Setiap tahunnya Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yang mana juga diberikan penilaian dan peringkat atas Implementasi SAKIP yang diterapkan di masing-masing Perangkat Daerah.



Capaian Indikator Kinerja Daerah
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

No	IKD	Satuan	Target Capaian	Realisai	Realisai	Realisai	Realisai	ANALISIS CAPAIAN KINERJA (PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT)
			2025	tw 1 2025	tw 2 2025	tw 3 2025	tw 4 2025	
	PERPUSTAKAAN							
17.1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	72	0	0	0	7,79	Nilai yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional RI
17.2	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kepustakaan	Indeks	97,5	0	0	0	97,5	Nilai IKM menggunakan nilai rata-rata tertimbang dengan masing-masing unsur pelayanan yakni 1. Bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh petugas perpustakaan 2. Bagaimana ketersediaan koleksi bahan pustaka 3. Bagaimana kenyamanan ruangan perpustakaan dan 4. Bagaiman ketersediaan sarana pendukung, ruang baca, toilet dan mussala.Survey dilakukan dengan menggunakan aplikasi INLIs Lite.
17.3	Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk	Rasio	3,5	59,1	0	0	71,48	Ketercukupan Koleksi Perpustakaan datanya diambil berdasarkan jumlah koleksi masing-masing jenis perpustakaan. Perpusta, Perpustakaan Sekolah, Nagari, TBM dan Perpustakaan Khusus



RENCANA KERJA 2026

17.4	Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat	%	0,6	1.96	0,57	0,94	10.05	Persentase Kemanfaatan Perpustakaan datanya diambil dari jumlah kunjungan Perpustakaan Daerah dan Perpustakaan Nagari
17.5	Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk	Rasio	0,3	0,87*	0,92	0,97	1,06	Data berdasarkan pada data Pendataan Perpustakaan yang dilakukan dalam aplikasi data.pusnas.go.id
17.6	Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	%	0,5	0	0	0,5	31.19	Data berdasarkan pada data Pendataan Perpustakaan yang dilakukan dalam aplikasi data.pusnas.go.id
17.7	Persentase Naskah Kuno dan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diakuisisi/dialihmedia (Digitalisasi)/Terdaftar	%	50	0	10	10	10	Data didapat dari hasil koordinasi di lapangan dengan ahliwaris pemilik naskah
17.8	Persentase Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	%	0,08	1,96	0,57	0,94	10.05	Data berdasarkan pada statistik kunjungan yang dilakukan setiap bulannya
17.9	Persentase Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	%	0,54	49,55*	49,55	49,55	49.12	Koleksi yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah
17.10	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Ratio	1,1	0,13*	0,14	0,14	1,54	Jumlah seluruh perpustakaan baik Perpustakaan Daerah, Nagari, Khusus bahkan TBM yang ada di Kabupaten Padang Pariaman
17.11	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	Jumlah (Org)	24.551	1.022	17.602	26.981	45.787	Data berdasarkan pada statistik kunjungan yang dilakukan setiap bulannya



RENCANA KERJA 2026

17.12	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Jumlah	6.384	294781*	294.781	294.781	325.432	Koleksi buku yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah meliputi Perpustakaan Nagari, Seolah, Khusus dan juga TBM
17.13	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	5	0	5	5	5	Jumlah tenaga Pustakawan (bukan teknis) yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah Kab. Padang Pariaman

No	IKD	Satuan	Target	Realisai	Realisai	Realisai	Realisai	ANALISIS CAPAIAN KINERJA (PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT)
			2025	tw 1 2025	tw 2 2025	tw 3 2025	tw 4 2025	
	KEARSIPAN							
18.1	Indeks kearsipan Eksternal	Indeks	68,5	0	0	0	B (66,06)	Nilai yang dikeluarkan oleh ANRI. Realisasi nilai LAKE Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 sebesar 66,06 turun jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2025 yakni 70,11



RENCANA KERJA 2026

18.2	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Laporan Audit Kearsipan Internal yang Baik	%	20,93	0	0	33	0	Meningkatnya kesadaran Perangkat Daerah Dalam Penataan, Pengelolaan Kearsipan
18.3	Persentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan.	%	25	0	0	0	0	Belum Adanya SKKAD (Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis) sebagai dasar/regulasi Perbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup berupa peraturan kepala daerah dan karena masih dalam tahap pengajuan harmonisasi (masih dalam bentuk draf Rancangan Peraturan Bupati tentang SKKAD)
18.4	Persentase Peningkatan Arsip Statis yang terselamatkan	%	65	20	10	10	25	Penyelamatan Arsip dilakukan di Lembaga Kearsipan Daerah dengan Persentase 40%
18.5	Persentase Peningkatan Arsip daerah yang alih mediakan	%	60	20	10	10	20	Pengalihmediaan Arsip Statis yang dilakukan di LKD yang terdapat pada Aplikasi Srikandi dan alihmedia arsip statis OPD



RENCANA KERJA 2026

18.6	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Orang	8	2	2	2	2	Tidak adanya penambahan SDM Pengelola Kearsipan
------	-------------------------------------	-------	---	---	---	---	---	---



2.3. Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan adalah penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Bidang-Bidang per urusan dalam Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Padang Pariaman.

Identifikasi permasalahan pada perangkat daerah merupakan salah satu input bagi perumusan tujuan dan sasaran yang bersifat prioritas sesuai *platform* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Dari bab II yang telah di paparkan terdahulu terdapat capaian kinerja perangkat daerah yang dapat kita telaah dari capaian kinerja tersebut, permasalahan-permasalahan apa yang menyebabkan terkendalanya dalam mencapai target kinerja yang telah di tetapkan.

Permasalahan-permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi pada saat ini dan diperkirakan dihadapi juga pada masa yang akan datang oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

- a. Masih terbatasnya akses perpustakaan dan fasilitas belajar di nagari-nagari.
- b. Kurangnya program literasi yang terintegrasi dengan budaya lokal dan kegiatan sehari-hari masyarakat
- c. Rendahnya kesadaran keluarga dan masyarakat dalam membiasakan budaya membaca dan belajar
- d. Keterbatasan tenaga pendidik dan fasilitator literasi yang memahami karakteristik budaya dan bahasa daerah minangkabau
- e. Minimnya dukungan pemerintah daerah dalam pengembangan literasi berbasis teknologi dan digital di tingkat nagari dan sekolah

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan teknologi menggiring perpustakaan ke arah digital dengan mengembangkan sistem ebook dan konvesional
2. Pembudayaan kegiatan membaca dengan memberdayakan penggiat literasi
3. Memberi perhatian dan dukungan lebih dalam peningkatan pengelolaan dan layanan perpustakaan dengan melengkapi sarana prasarana dan instrumen lain yang dibutuhkan untuk akreditasi sesuai SNP
4. Meningkatkan pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat dengan menggiatkan kegiatan literasi berbasis inklusi sosial Peningkatan Budaya Gemar Membaca
5. Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA)
6. Mewujudkan penataan arsip OPD yang baik sebagai salah satu instrumen penilaian LAKE LKD
7. Menyiapkan gedung galeri arsip statis dan sarana prasarana pendukung serta memanfaatkan teknologi dalam memberikan pelayanan informasi kearsipan secara digital



RENCANA KERJA 2026



RENCANA KERJA 2026

Tabel Pagu Indikatif 2026

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Ca	tat	an
												P	e	n
												t	i	n
												g		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dari Inspektorat	BB (79)	3.287.423.840	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dari Inspektorat	BB (79)	3.287.423.840			
2,01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu 2. Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	1. 3 Dokumen 2. 12 laporan	2,01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu 2. Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	1. 3 Dokumen 2. 12 laporan	30.000.000		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	15.000.000				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen			



RENCANA KERJA 2026

2,0 1	0 6			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 dokumen	15.000.000	2 , 0 1	0 6			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 dokumen	15.000.000	
2,0 2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan	13 Laporan	3.086.600.000	2 , 0 2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan	13 Laporan	3.086.600.000		
2,0 2	0 1			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26/14 orang/bulan	3.000.000.000	2 , 0 2	0 1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26/14 orang/bulan	3.000.000.000	
2,0 2	0 2			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	81.600.000	2 , 0 2	0 2			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	81.600.000	
2,0 2	0 5			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13 Laporan	5.000.000	2 , 0 2	0 5			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13 Laporan	5.000.000	
2,0 5			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala Jumlah SKP ASN Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP	5 Orang 10 Orang 26 Orang 26 Orang		2 , 0 5			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala Jumlah SKP ASN Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP	5 Orang 10 Orang 26 Orang 26 Orang			



RENCANA KERJA 2026

2,0 5	0 8			Jumlah ASN yang dipindah tugaskan	5 Orang	2 , 0 5	1 1		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			
2,0 5	1 1			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	2 , 0 5	1 1		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			
2,0 6			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	100%	2 , 0 6			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	100%	388.234.000	
2,0 6	0 6			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2 , 0 6	0 2			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		
2,0 6	0 8			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2 , 0 6	0 3			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		
2,0 6	0 9			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	2 , 0 6	0 5			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		
2,0 6	1 0			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	2 , 0 6	0 6			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		



RENCANA KERJA 2026

2,08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia 2. Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan	100%	170.823.840	2,08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia 2. Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan	100%	170.823.840	
2,08	01			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	15.000.000	2,08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	15.000.000	
2,08	02			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	48.000.000	2,08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	48.000.000	
2,08	04			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	107.823.840	2,08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	107.823.840	
2,09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah			2,09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah			
2,09	06			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit		2,09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit		
2,09	09			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit		2,09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit		



RENCANA KERJA 2026

			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Ketersediaan Arsip	68%	52.000.000				PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Ketersediaan Arsip	68%	52.000.000	
2,0 1			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip 2. Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip		22.000.000	2 , 0 1			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip 2. Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip		22.000.000	
2,0 1	0 1			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	7000 Naskah Dinas	10.000.000	2 , 0 1			Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	7000 Naskah Dinas	10.000.000	
2,0 1	0 3			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Laporan	12.000.000	2 , 0 3			Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Laporan	12.000.000	
2,0 1	0 5			Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	1 OPD		2 , 0 5			Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	1 OPD		
2,0 1	1 0			Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	25 OPD		1 0			Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	25 OPD		
2,0 2			Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Arsip Statis yang diolah, diakuisisi dan di preservasi		10.000.000	2 , 0 2			Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Arsip Statis yang diolah, diakuisisi dan di preservasi		10.000.000	



RENCANA KERJA 2026

2,0 2	0 2		Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	60 arsip statis	10.000.000	2 , 0 2	0 2		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	60 arsip statis	10.000.000	
2,0 3			Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan layanan SIKN/JIKN	20.000.000	2 , 0 3			Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan layanan SIKN/JIKN		20.000.000	
2,0 3	0 1		Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	1 Layanan	20.000.000	2 , 0 3	0 1		Penyediaan Informasi, Akses, dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	1 layanan	20.000.000	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip					PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip			
2,0 1			Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK		2 , 0 1			Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK			



RENCANA KERJA 2026

2,0 1	0 1		Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			2 , 0 1	0 1		Penilaian, Penetapan, dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			
2,0 1	0 2		Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan			2 , 0 1	0 2		Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan			
2,0 2		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Jumlah Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK			2 , 0 2			Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Jumlah Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK			
2,0 2	0 1		Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana			2 , 0 2	0 1		Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana			
2,0 2	0 2		Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana			2 , 0 2	0 2		Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana			
2,0 3		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah			2 , 0 3			Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah Kegiatan Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan			



RENCANA KERJA 2026

			Kecamatan dan Desa/Kelurahan	kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di Kabupaten/Kota							yang sesuai NSPK di Kabupaten/Kota			
2,03	01			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			2,03	01			Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		
				Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota							Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		
				Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan							Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan		
2,03	04			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan			2,03	04			Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan		



RENCANA KERJA 2026

2,0 4			Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK			2 , 0 4			Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK			
2,0 4	0 1			Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan			2 , 0 4	0 1		Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan			
2,0 4	0 2			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip			2 , 0 4	0 2		Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip			
2,0 5			Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Kegiatan Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK			2 , 0 5			Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota Dinyatakan Hilang	Jumlah Kegiatan Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK			
2,0 5	0 1			Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan			2 , 0 5	0 1		Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan			



RENCANA KERJA 2026

2,0 5	0 2		Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang			2 , 0 5	0 2		Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang		
2,0 5	0 3		Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman			2 , 0 5	0 3		Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman		
		PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan arsip yang bersifat tertutup	7				PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP		Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan arsip yang bersifat tertutup	7	
2,0 1		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK			2 , 0 1		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK			
2,0 1	0 1		Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	SOP		2 , 0 1	0 1		Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	SOP	



RENCANA KERJA 2026

2,0 1	0 2		Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	1 Daftar arsip		2 , 0 1	0 2		Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	1 Daftar arsip		
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	72	245.576.160			PROGRAM PERPUSTAKAAN	PEMBINAAN	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	72	245.576.160	
2,0 1		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.Rasio ketercukupan koleksi Perpustakaan dengan penduduk 2.Rasio ketercukupan tenaga Perpustakaan dengan penduduk 3. Persentase Perpustakaan sesuai standar nasional Perpustakaan		170.000.000	2 , 0 1		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.Rasio ketercukupan koleksi Perpustakaan dengan penduduk 2.Rasio ketercukupan tenaga Perpustakaan dengan penduduk 3. Persentase Perpustakaan sesuai standar nasional Perpustakaan			170.000.000	
2,0 1	0 1		Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	20 pustaka	15.000.000	2 , 0 1	0 1		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	20 pustaka	15.000.000	



RENCANA KERJA 2026

2,0 1	0 2		Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	50 pustaka	60.000.000	2 , 0 1	0 2		Pengembangan Perpusutakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	50 pustaka	60.000.000	
2,0 1	0 4		Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	15 Perpustak aan	20.000.000	2 , 0 1	0 4		Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	15 Perpustak aan	20.000.000	
2,0 1	0 5		Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan			2 , 0 1	0 5		Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan			
2,0 1	0 6		Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2 , 0 1	0 6		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2,0 1	0 7		Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi			2 , 0 1	0 7		Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi			



RENCANA KERJA 2026

2,0 1	0 8		Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan		50.000.000	2 , 0 1	0 8		Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan		50.000.000	
2,0 1	0 9		Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	500 EKS	10.000.000	2 , 0 1	0 9		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	500 EKS	10.000.000	
2,0 1	1 0		Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Laporan	15.000.000	2 , 0 1	1 0		Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan, dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Laporan	15.000.000	
2,0 2			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah pemyarakatan gemar membaca di masyarakat 2. Persentase kemanfaatan Perpustakaan oleh masyarakat		75.576.160	2 , 0 2		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah pemyarakatan gemar membaca di masyarakat 2. Persentase kemanfaatan Perpustakaan oleh masyarakat		75.576.160	
2,0 2	0 1		Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	1 Lokus	15.000.000	2 , 0 2	0 1		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	1 Lokus	15.000.000	



RENCANA KERJA 2026

2,0 2	0 2		Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat_x005fTemp at Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			2 , 0 2	0 2		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat_x005fTemp at Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
2,0 2	0 3		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	12 Orang	30.000.000	2 , 0 2	0 3		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	12 Orang	30.000.000	
2,0 2	0 4		Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	1 Layanan	15.000.000	2 , 0 2	0 4		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	1 Layanan	15.000.000	
2,0 2	0 5		Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	2 Orang	15.576.160	2 , 0 2	0 5		Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	2 Orang	15.576.160	
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dimiliki	14%	15.000.000			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dimiliki	14%	15.000.000		



RENCANA KERJA 2026

2,0 1			Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialihmedia (digitalisasi)/terdaftar yang ada diwilayahnya 2. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih Bahasa	10 naskah kuno	15.000.000	2 , 0 1			Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialihmedia (digitalisasi)/terdaftar yang ada diwilayahnya 2. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih Bahasa	10 naskah kuno	15.000.000		
2,0 1	0 1			Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno			2 , 0 1	0 1			Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno			
2,0 1	0 2			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	20 NASKAH KUNO	15.000.000	2 , 0 1	0 2			Pengembangan, Pengolahan, dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	20 NASKAH KUNO	15.000.000	
2,0 2			Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)			2 , 0 2			Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)				



RENCANA KERJA 2026

2,0 2	0 1		Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan			2 , 0 2	0 1		Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang tersimpan dan atau Terdaftar	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan			
2,0 2	0 2		Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan			2 , 0 2	0 2		Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan			



2.4. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan

Rencana kerja (renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2026 merupakan penjabaran dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025-2029. Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sejalan dengan kebijakan Pemerintah daerah Padang Pariaman dengan memperhatikan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2026 ditetapkan tolak ukur kinerja melalui indicator makro, indicator ekonomi dan social.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan pada Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang merupakan sinergitas perencanaan mulai dari tingkat Nagari, Kecamatan dan Perangkat Daerah, maka tahun 2026 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tidak ada usulan skala prioritas dari hasil musrenbang. Adapun Program dan kegiatan yang dituangkan dalam rencana tahun 2026 berdasarkan target kinerja yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Dalam konteks perencanaan pembangunan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada untuk memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, agar mampu membuat perencanaan yang lebih baik, sehingga mampu untuk merumuskan program dan kegiatan untuk Kesejahteraan masyarakat.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Namun dalam proses ini Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain. Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.



RENCANA KERJA 2026

TABEL 2.10
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARSAN/VOLUME	CATATAN
1.	TIDAK ADA				

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah sangat penting untuk memastikan sinkronisasi antara perencanaan di tingkat daerah dan prioritas pembangunan nasional. Kebijakan nasional yang tertuang dalam dokumen strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), kebijakan fiskal nasional, serta instruksi dan arahan presiden menjadi pedoman utama dalam proses perencanaan di daerah. Renja perangkat daerah harus merujuk dan menyesuaikan diri dengan arahan kebijakan nasional tersebut agar tujuan pembangunan daerah tidak terpisah dari kerangka besar pembangunan nasional

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten padang Pariaman merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman.

Kebijakan nasional yang relevan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kebijakan nasional berperan sebagai panduan utama dalam merumuskan arah pembangunan daerah, termasuk Dinas, agar selaras dengan visi dan misi pembangunan nasional. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang direncanakan pada tingkat Dinas perlu merujuk pada berbagai kebijakan, rencana, dan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Salah satu kebijakan nasional yang menjadi acuan penting dalam penyusunan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah RPJMN yang menetapkan prioritas pembangunan selama lima tahun. RPJMN menguraikan program prioritas di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi, yang harus diimplementasikan di tingkat daerah. Renja perangkat daerah harus menafsirkan prioritas nasional ini ke dalam konteks lokal dengan menyesuaikan program dan kegiatan yang relevan dengan kondisi serta kebutuhan daerah, namun tetap mengacu pada tujuan nasional.



RENCANA KERJA 2026

Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam menyusun Renja perangkat daerah bertujuan untuk menciptakan sinergi antara perencanaan daerah dan nasional. Hal ini memastikan bahwa upaya pembangunan di daerah mendukung visi dan misi nasional, serta memperkuat harmonisasi perencanaan pembangunan lintas sektor dan wilayah. Dengan demikian, pembangunan daerah tidak hanya memberikan dampak lokal yang positif, tetapi juga mendukung pencapaian target pembangunan Indonesia secara keseluruhan

Berikut adalah sinkronisasi Visi dan Misi RPJMN Tahun 2020-2024, Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Pariaman Tahun 2021-2026

Tabel 3.1

Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029, Provinsi Sumatera Barat 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Pariaman Tahun 2025-2029

No	Visi RPJMN Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029
	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan	Padang Pariaman Maju dan Sejahtera
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas
2.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru	Lumbung Pangan Nasional Dan Ekonomi Berkelanjutan	Menciptakan SDM yang berkualitas dan berdaya saing
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju dan Merata
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Sumatera Barat Pusat Perdagangan Dan Bisnis Sumatera Bagian Barat	Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan



RENCANA KERJA 2026

No	Visi RPJMN Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029
	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan	Padang Pariaman Maju dan Sejahtera
	kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas		
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Membangun Infrastruktur Berkeadilan Dan Siap Tanggap Bencana	Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Membangun Kehidupan Beradat Dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas	
7	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Tingkatkan Daya Saing Pariwisata Dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM	
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Tata Kelola Pemerintahan Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Efektif	

Berikut adalah sinkronisasi pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Tabel 3.2

Sinkronisasi Pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026



RENCANA KERJA 2026

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2025
	Tema	Tema	Tema
1.	Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi dan hak azazi manusia	Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosal kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat	Prioritas 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"
2.	Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital Prioritas 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan
3.	Prioritas Nasional 3: Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Prioritas 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Prioritas 2. Penguatan Infrastruktur Publik yang ramah lingkungan dengan memperhatikan tata ruang wilayah Prioritas 6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar
4.	Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,	Prioritas 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Prioritas 4. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dan Berketahanan Sosial



RENCANA KERJA 2026

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2025
	Tema	Tema	Tema
	prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	
5.	Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan
6.	Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.	Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Prioritas 7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Prioritas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel



RENCANA KERJA 2026

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2025
	Tema	Tema	Tema
8.	Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Prioritas 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi Bupati Kabupaten Padang Pariaman yaitu Padang Pariaman Maju dan Sejahtera dengan Misi yang telah ditetapkan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan termasuk dalam Misi ke-I yakni Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Berkualitas dan Berintegrasi dan Misi ke-II yakni Menciptakan SDM Yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Adapun Rumusan Tujuan didalam Perencanaan Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Untuk Tahun 2025-2029 adalah :

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas
2. Meningkatnya tata kelola arsip
3. Meningkatnya literasi masyarakat

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan di capai atau dihasilkan secara nyata oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman dalam jangka waktu tahunan sampai lima tahun mendatang. Sasaran didalam Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah :

1. Meningkatnya Kualitas SDM
2. Meningkatnya Layanan Kearsipan



RENCANA KERJA 2026

3. Meningkatnya Layanan Perpustakaan

4. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Visi dan misi Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Padang Pariaman dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir (2030)
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah.		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah		78	79.50	80	80,5	81	81
		Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah		78	79.50	80	80,5	81	81
2	Meningkatnya literasi masyarakat		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)		5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya Layanan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca Masyarakat		59	60	61	62	63	64
3	Meningkatnya tata kelola arsip		Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup pemerintahan daerah		71	72	72,5	73	75	75
		Meningkatnya Kualitas SDM	Persentase pustakawan dan arsiparis yang bersertifikat		15	20	20	25	25	25
		Meningkatnya Layanan Kearsipan	Persentase dokumen arsip dalam bentuk digital		20	23	25	30	35	35



RENCANA KERJA 2026

Tabel 3.5

Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan, Indikator Sasaran dan Target Kinerja

Dinas Dinas Kearsipan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026

Visi	Misi	Tujuan OPD	Indikator Tujuan OPD	Target 2026	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target 2026
Padang Pariaman Maju dan Sejahtera	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas	Meningkatnya Kualitas tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	72,19	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	79,50
		Meningkatnya tata kelola arsip	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup pemerintahan daerah	72	Meningkatnya Kualitas SDM	Persentase pustakawan dan arsiparis yang bersertifikat	20
					Meningkatnya Layanan Kearsipan	Persentase dokumen arsip dalam bentuk digital	23
		Meningkatnya literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	6	Meningkatnya Layanan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca Masyarakat	60

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah strategi dan kebijakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menunjukkan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Strategi dan kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Peningkatan Sistem dan Teknologi Kearsipan
3. Pelaksanaan Pengawasan yang Berkelanjutan dan Efektif
4. Perluasan dan Diversifikasi Akses Bacaan
5. Inovasi Program Literasi yang Menarik
6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kolaborasi

3.3 Program dan Kegiatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, disamping melaksanakan program dan kegiatan rutin Perangkat Daerah, pada tahun 2026 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menyelenggarakan 2 (Dua) Urusan Wajib bukan pelayanan Dasar, yaitu Urusan perpustakaan dan kearsipan, yang secara keseluruhan meliputi 6 program, 19 kegiatan, dan 70 subkegiatan dengan total anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp4.833.627.964,- Berikut lampiran rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026 pada table Matrix Renja 2026:



RENCANA KERJA 2026

Tabel Matrix Renja 2026 (TC.33)

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Renstra 2025-2029

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman

Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
3	4	5	6	7	8	9	15	16	17
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN						3.700.000.000,00		10.000.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.700.000.000,00		10.000.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						250.000.000,00		0	
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						235.000.000,00	-	0	
[Nilai Tingkat Kegemaran Membaca]	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	76	69.59	70	72	235.000.000,00	-	0	-
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perpustakaan Umum Yang menggunakan	-			40 15 25 %	185.000.000,00	-	0	DINAS KEARSIPAN



RENCANA KERJA 2026

	<i>Aplikasi berbasis IT, Persentase Peningkatan Koleksi Bahan Pustaka, dan persentase kunjungan Pemustaka ke perpustakaan</i>								DAN PERPUSTAKAAN
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan									
	<i>Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan</i>				15 Perpustakaan	20.000.000,00		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
	<i>Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya</i>				50 Perpustakaan	90.000.000,00		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota									
	<i>Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi</i>				0 Layanan	0		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota									
	<i>Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai</i>				20 Perpustakaan	0		0	DINAS KEARSIPAN



RENCANA KERJA 2026

	<i>kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan</i>								DAN PERPUSTAKAAN
Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat									
	<i>Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat</i>				0 Eksemplar	0		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi									
	<i>Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi</i>				5 Dokumen	10.000.000,00		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
	<i>Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>				0 Orang	0		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan									
	<i>Jumlah Data dan informasi Perpustakaan</i>				1 Dokumen	15.000.000,00		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN



RENCANA KERJA 2026

Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan									
	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				500 Eksemplar	40.000.000,00		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota									
	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/ Kota yang Dikembangkan				0 Eksemplar	0		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik									
	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK				20 Perpustakaan	10.000.000,00		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan kegemaran membaca Jumlah pelibatan kegiatan masyarakat di Perpustakaan wilayah Kabupaten Padang Pariaman	-			18	50.000.000,00	-	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
					Penghargaan 400 Orang				
Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
	Jumlah Duta Baca/ Bunda Baca/ Bunda Literasi Tingkat Daerah				1 Orang	15.000.000,00		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN



RENCANA KERJA 2026

	<i>Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya</i>								
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial									
	<i>Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan</i>				5 Perpustakaan	15.000.000,00		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca									
	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota</i>				9 Orang	20.000.000,00		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat									
	<i>Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat</i>				2 Lokus	0		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO						15.000.000,00	-	0	
[Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dimiliki]	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	22	10	12	14	15.000.000,00	-	0	-
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialihmedia</i>	-			20 Eksemplar	15.000.000,00	-	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN



RENCANA KERJA 2026

	(digitalisasi)/terdaftar yang ada diwilayahnya								
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno									
	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno				0 Orang	0		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan									
	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan				20	15.000.000,00		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
					Eksemplar				
Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/ atau terdaftar yang ada di wilayahnya	-			5 Eksemplar	0	-	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara									
	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/ Kota				5 Eksemplar	0		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pengolahan dan Penyilangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara									



RENCANA KERJA 2026

	<i>Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/ Kota</i>				0 Eksemplar	0		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						3.450.000.000,00		10.000.000,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.350.000.000,00	-	0	
[Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dari Inspektorat]	-	-	-	-	-	3.350.000.000,00	-	0	-
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah</i>	-			100 Persen	49.759.000,00	-	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	24.754.000,00		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan</i>				10 Laporan	25.005.000,00		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN



RENCANA KERJA 2026

	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	3.096.241.000,00	-	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25/14	3.004.641.000,00		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
					Orang/bulan				
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	81.600.000,00		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	10.000.000,00		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	-			100 Persen	0	-	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan				25 Orang	0		0	DINAS KEARSIPAN



RENCANA KERJA 2026

	<i>Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>								DAN PERPUSTAKAAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah</i>	-			100 Persen	50.000.000,00	-	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	50.000.000,00		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			100 Persen	154.000.000,00	-	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	0		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	46.000.000,00		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	108.000.000,00		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN



RENCANA KERJA 2026

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			100 Persen	0	-	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	0		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	0		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						79.999.500,00	-	0	
[Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis]	Tingkat Ketersediaan Arsip	72	66.49	67	68	79.999.500,00	-	0	-
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan peserta bimtek yang lulus ujian sertifikasi Persentase pengelola	-			50 Persen	50.000.000,00	-	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Kearsipan yang menguasai Pengelolaan, Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis				50 Persen				
	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan sistem kearsipan yang baku				85 Persen				
Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis									



RENCANA KERJA 2026

	<i>Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan</i>				7000 Berkas	20.000.000,00		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis									
	<i>Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan</i>				5 Berkas	0		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota									
	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				26 Laporan	20.000.000,00		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis									
	<i>Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis</i>				0 Unit	0		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota									
	<i>Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan</i>				1 Lembaga	0		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip									
	<i>Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip</i>				0 Lembaga	0		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota									
	<i>Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi</i>				0 Laporan	0		0	DINAS KEARSIPAN



RENCANA KERJA 2026

	<i>penyelenggaraan kearsipan</i>								DAN PERPUSTAKAAN
Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota									
	<i>Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis</i>				25 Instansi	10.000.000,00		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Arsip Statis yang diolah, diakuisisi dan di preservasi</i>	-			20 Persen	0	-	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI									
	<i>Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI</i>				5 Arsip	0		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis									
	<i>Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis</i>				60 Arsip	0		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	<i>Persentase peningkatan layanan SIKN/JIKN</i>	-			10 Persen	29.999.500,00	-	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN									



RENCANA KERJA 2026

	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Melalui JIKN				43 Pengguna	29.999.500,00		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota									
	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/ Kota				0 Laporan	0		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP						20.000.500,00	-	10.000.000,00	
[Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip]	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	73	57	58	61	20.000.500,00	-	10.000.000,00	-
Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase Pemusnahan Arsip yang sesuai NSPK Jumlah Peraturan Bupati tentang Kearsipan	-			10 Persen 2 Perbup	20.000.500,00	-	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun									
	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di				20 Berkas	20.000.500,00		0	DINAS KEARSIPAN



RENCANA KERJA 2026

	<i>Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan</i>								DAN PERPUSTAKAAN
Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun									
	<i>Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun</i>				25 Arsip	0		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	<i>Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang sesuai NSPK</i>	-			5 Persen	0	-	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana									
	<i>Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana</i>				20 Arsip	0		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana									
	<i>Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana</i>				20 Arsip	0		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	<i>Jumlah Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Pengelolaan Kearsipan</i>	-			25 Nagari	0	-	10.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan									



RENCANA KERJA 2026

	<i>Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/ Kelurahan</i>				100 Arsip	0		10.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK</i>	-			240 Berkas	0	-	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip									
	<i>Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan</i>				0 Arsip	0		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip									
	<i>Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip</i>				0 Arsip	0		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
-	-	-	-	-	-	20.000.500,00	-	10.000.000,00	-
Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	<i>Jumlah Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan</i>	-			2 Berkas	0	-	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)									
	<i>Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang</i>				0 Arsip	0		0	DINAS KEARSIPAN



RENCANA KERJA 2026

	<i>Dilakukan Penetapan dan Pengumuman</i>								DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP						0	-	0	
[Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan arsip yang bersifat tertutup]	-	-	-	-	-	0	-	0	-
Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	<i>Persentase Layanan Penggunaan Arsip Bersifat Tertutup</i>	-			5 Persen	0	-	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup									
	<i>Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan</i>				5 SOP	0		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup									
	<i>Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup</i>				150 Arsip	0		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
						3.700.000.000,00		10.000.000,00	



RENCANA KERJA 2026

Adapun program dan kegiatan Urusan Kearsipan dan Perpustakaan yang diorientasikan pada layanan public dan sesuai dengan Prioritas Daerah dan Sasaran Daerah pada tahun 2026 adalah sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pengembangan Dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
 - 2) Pengembangan Perpustakaan Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



RENCANA KERJA 2026

- 3) Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi
- 4) Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan
- 5) Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
- 6) Penyusunan Data Dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan Dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat
- 2) Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
- 3) Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
- 4) Pemilihan Duta baca Tingkat Daerah

III. PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO

1. Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Pengembangan Minat dan Budaya Baca
- 2) Pengembangan, Pengolahan Dan Pengalihmediaan Naskah Kuno Yang Dimiliki Oleh Masyarakat Untuk Dilestarikan Dan Didayagunakan

2. Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah daerah kabupaten.kota

- 1) Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
- 2) Pengelolaan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara

IV. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

1. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
- 2) Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
- 3) Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
- 4) Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota



RENCANA KERJA 2026

- 5) Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota
2. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepala ANRI
 - 2) Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
3. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
 - 1) Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN
 - 2) Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota

V. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP

1. Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
 - 1) Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun
 - 2) Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun
2. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota
 - 1) Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana
 - 2) Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana
3. Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
 - 1) Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan
4. Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota
 - 1) Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
 - 2) Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
5. Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang



RENCANA KERJA 2026

- 1) Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)

VI. PROGRAM PERIJINAN PENGGUNAAN ARSIP

1. Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota
 - 1) Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup
 - 2) Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup



RENCANA KERJA 2026



RENCANA KERJA 2026

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2026 ditunjukkan pada lampiran sebagai berikut:

Matrix Renja 2026

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARG ET AKHI R PERIO DE RENS TRA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
					TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)			PRIORITAS		KELOMP OK SASARA N	TARGE T	PAGU INDI KATI F (Rp)	
									LOKAS I	SUMBER DANA				
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN						3.700.000. 000,00							10.00 0.000 ,00	
URUSAN PEMERINTA HAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.700.000. 000,00							10.00 0.000 ,00	
URUSAN PEMERINTA						250.000.0 00,00							0	



RENCANA KERJA 2026

HAN BIDANG PERPUSTAKAAN														
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						235.000.000,00						-	0	
[Nilai Tingkat Kegemaran Membaca]	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	76	69.59	70	72	235.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0	-
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perpustakaan Umum Yang menggunakan Aplikasi berbasis IT, Persentase Peningkatan Koleksi Bahan Pustaka, dan persentase	-			40 15 25 %	185.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan	Kabupaten Padang Pariaman	-	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN



RENCANA KERJA 2026

	kunjungan Pemustaka ke perpustakaan								sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	' Terampil dan Berdaya Saing				
										2. Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan														
	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan				15 Perpustakaan	20.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat,	Kabupaten Padang Pariaman		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN



RENCANA KERJA 2026

	dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan						Kel/De sa				Berp engetahu an				
									sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.		' Terampil dan Berdaya Saing				
											2. Mencipta kan Sumber Daya Manusia yang Berkualit as dan Berdaya Saing				
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman - 113



RENCANA KERJA 2026

										Berdaya Saing				
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota														
	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi				0 Layanan	0	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan	Kabupaten Padang Pariaman		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN



RENCANA KERJA 2026

									sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah yang rentan disabilitas.	Terampil dan Berdaya Saing				
										2. Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				
Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota														
	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibangun sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam				20 Perpustakaan	0	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat,	Kabupaten Padang Pariaman		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN



Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman - 117 -



RENCANA KERJA 2026

										Berdaya Saing				
Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi														
	Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi				5 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan	Kabupaten Padang Pariaman		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN



RENCANA KERJA 2026

									sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah yang disabilitas.	' Terampil dan Berdaya Saing				
										2. Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga				0 Orang	0	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat,	Kabupaten Padang Pariaman		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN



RENCANA KERJA 2026

	Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						Kel/Desa				Berpengertian				
										sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangga disabilitas.	Terampil dan Berdaya Saing				
											2. Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				
Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan															

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman - 121



RENCANA KERJA 2026

										Berdaya Saing				
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan														
	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				500 Eksemplar	40.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan	Kabupaten Padang Pariaman		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN



RENCANA KERJA 2026

									sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah yang disabilitas.	, Terampil dan Berdaya Saing				
										2. Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				
Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota														
	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				0 Eksemplar	0	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat,	Kabupaten Padang Pariaman		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN



Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman - 125 -



RENCANA KERJA 2026

										Berdaya Saing				
Pembudayaa n Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah penghargaan kegemaran membaca Jumlah pelibatan kegiatan masyarakat di Perpustakaan wilayah Kabupaten Padang Pariaman	-			18	50.000.000 ,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan	Kabupaten Padang Pariaman	-	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
					Penghargaan 400 Orang				sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Terampil dan Berdaya Saing				



RENCANA KERJA 2026

										2. Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				
Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya				1 Orang	15.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan	Kabupaten Padang Pariaman		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN



RENCANA KERJA 2026

									sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangkutan disabilitas.	' Terampil dan Berdaya Saing				
										2. Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														
	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota				5 Perpustakaan	15.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat,	Kabupaten Padang Pariaman		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN



Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman



RENCANA KERJA 2026

Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota					9 Orang	20.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan	Kabupaten Padang Pariaman		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
									sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	, Terampil dan Berdayasaing				
										2. Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan				



RENCANA KERJA 2026

										Berdaya Saing				
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat														
	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				2 Lokus	0	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kabupaten Padang Pariaman		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI						15.000.000,00						-	0	



RENCANA KERJA 2026

NASIONAL DAN NASKAH KUNO														
[Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dimiliki]	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	22	10	12	14	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0	-
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialihmedia (digitalisasi)/terdaftar yang ada diwilayahnya	-			20 Eksemplar	15.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan	Kabupaten Padang Pariaman	-	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
									sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangkutan disabilitas.	, Terampil dan Berdaya Saing				



RENCANA KERJA 2026

										2. Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno														
	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno				0 Orang	0	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan	Kabupaten Padang Pariaman		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN



RENCANA KERJA 2026

									sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah yang rentan disabilitas.	Terampil dan Berdaya Saing				
										2. Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				
Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan														
	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmedia				20	15.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat,	Kabupaten Padang Pariaman		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN



RENCANA KERJA 2026

	an untuk dilestarikan dan didayagunakan						Kel/Desa				Berpengertian				
					Eksemplar				sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.		Terampil dan Berdaya Saing				
											2. Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				



RENCANA KERJA 2026

Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya	-			5 Eksemplar	0			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan	Kabupaten Padang Pariaman	-	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
									sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	, Terampil dan Berdaya Saing				
										2. Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan				



RENCANA KERJA 2026

										Berdaya Saing				
Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara														
	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota				5 Eksemplar	0	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan	Kabupaten Padang Pariaman		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN



RENCANA KERJA 2026

									sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	, Terampil dan Berdaya Saing				
										2. Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				
Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara														
	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan				0 Eksemplar	0	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat,	Kabupaten Padang Pariaman		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN



RENCANA KERJA 2026

Daerah Tingkat Kabupaten/Kota							Kel/Desa			Berpengertian				
									sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terampil dan Berdaya Saing				
										2. Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				



RENCANA KERJA 2026

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						3.450.000.000,00							10.000.000,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA						3.350.000.000,00						-	0	
[Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dari Inspektorat]	-	-	-	-	-	3.350.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0	-
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	-			100 Persen	49.759.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN



RENCANA KERJA 2026

										5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	24.754.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
										5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														



RENCANA KERJA 2026

	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan	25.005.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	3.096.241.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN



RENCANA KERJA 2026

										5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25/14	3.004.641.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
					Orang/bulan				.	5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya				
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														



RENCANA KERJA 2026

	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	81.600.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN



RENCANA KERJA 2026

										5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya				
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	-			100 Persen	0			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
									.	5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya				
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														



RENCANA KERJA 2026

	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				25 Orang	0	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	50.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN



RENCANA KERJA 2026

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	154.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN



RENCANA KERJA 2026

										5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	0	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
										5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman - 149



RENCANA KERJA 2026

	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	108.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
									.	5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			100 Persen	0			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN



RENCANA KERJA 2026

										5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya				
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	0	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
										5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya				
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														



RENCANA KERJA 2026

	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	0	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
						79.999.500,00				5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya		-	0	
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP														
[Meningkatkan tata kelola arsip dinamis dan statis]	Tingkat Ketersediaan Arsip	72	66.49	67	68	79.999.500,00	-	-	-	-	-	-	0	-



RENCANA KERJA 2026

Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan peserta bimtek yang lulus ujian sertifikasi Persentase pengelola	-			50 Persen	50.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Kabupaten Padang Pariaman	-	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Kearsipan yang menguasai Pengelolaan, Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis				50 Persen				.	5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya				
	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan sistem kearsipan yang baku				85 Persen									
Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis														



Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman



RENCANA KERJA 2026

	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				5 Berkas	0	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Kabupaten Padang Pariaman		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
									.	5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya				
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota														

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman - 156



RENCANA KERJA 2026

	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis				0 Unit	0	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Kabupaten Padang Pariaman		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
									.	5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya				
Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota														



Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman



Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman



Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman



RENCANA KERJA 2026

	Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis				25 Instansi	10.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Kabupaten Padang Pariaman		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
										5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya				
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Statis yang diolah, diakuisisi dan di preservasi	-			20 Persen	0			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Kabupaten Padang Pariaman	-	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN



RENCANA KERJA 2026

										5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya				
Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI														
	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI				5 Arsip	0	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Kabupaten Padang Pariaman		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
										5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya				
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis														



RENCANA KERJA 2026

	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				60 Arsip	0	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Kabupaten Padang Pariaman		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
									.	5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya				
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan layanan SIKN/ JIKN	-			10 Persen	29.999.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Kabupaten Padang Pariaman	-	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN



RENCANA KERJA 2026

Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN														
	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				43 Pengguna	29.999.500,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Kabupaten Padang Pariaman		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota														
	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				0 Laporan	0	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Kabupaten Padang Pariaman		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN



RENCANA KERJA 2026

										5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya				
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP						20.000.500,00						-	10.000.000,00	
[Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip]	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	73	57	58	61	20.000.500,00	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00	-
Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	<i>Persentase Pemusnahan Arsip yang sesuai NSPK Jumlah Peraturan Bupati tentang Kearsipan</i>	-			10 Persen	20.000.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Kabupaten Padang Pariaman	-	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN



RENCANA KERJA 2026

					2 Perbup					5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya				
Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun														
	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan				20 Berkas	20.000.500 ,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Kabupaten Padang Pariaman		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
										5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya				
Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun														



RENCANA KERJA 2026

	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				25 Arsip	0	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Kabupaten Padang Pariaman		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang sesuai NSPK	-			5 Persen	0			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Kabupaten Padang Pariaman	-	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN



RENCANA KERJA 2026

										5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya				
Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana														
	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				20 Arsip	0	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Kabupaten Padang Pariaman		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
										5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya				
Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana														



RENCANA KERJA 2026

	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				20 Arsip	0	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Kabupaten Padang Pariaman		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabungkan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan	Jumlah Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Pengelolaan Kearsipan	-			25 Nagari	0			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Kabupaten Padang Pariaman	-	10.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN



RENCANA KERJA 2026

Desa/Kelurahan										5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya				
Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan														
	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan				100 Arsip	0	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Kabupaten Padang Pariaman		10.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
										5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya				



RENCANA KERJA 2026

Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	-			240 Berkas	0			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Kabupaten Padang Pariaman	-	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip														
	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan				0 Arsip	0	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Kabupaten Padang Pariaman		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN



RENCANA KERJA 2026

										5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya				
Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip														
	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				0 Arsip	0	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Kabupaten Padang Pariaman		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
-	-	-	-	-	-	20.000.500,00	-	-	-	5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	-	-	10.000.000,00	-



RENCANA KERJA 2026

Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	-			2 Berkas	0			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Kabupaten Padang Pariaman	-	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
										5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya				
Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)														



RENCANA KERJA 2026

	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman				0 Arsip	0	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Kabupaten Padang Pariaman		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
										5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya				
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP						0						-	0	
[Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan arsip yang bersifat tertutup]	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-



RENCANA KERJA 2026

Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penggunaan Arsip Bersifat Tertutup	-			5 Persen	0			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Kabupaten Padang Pariaman	-	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
										5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya				
Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup														



Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman - 177 -



BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan menjadi acuan dalam rangka menyusun Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2026. Renja Perubahan akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025, beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 berpedoman pada dokumen RKPD Kabupaten Padang Pariaman s tahun 2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra -PD) Tahun 2025-2029 dalam upaya sinkronisasi program dan kegiatan, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Padang Pariaman.
2. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban berperan serta dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya.
3. Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026.
4. Sebagai umpan balik dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang, sehingga capaian kinerja semakin baik

Harapan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 adalah semoga dapat mendorong tercapainya cita-cita pembangunan Kabupaten Padang Pariaman. Melalui upaya tersebut, diharapkan terjadi kemajuan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, perlindungan lingkungan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.



RENCANA KERJA 2026

Dengan dukungan dan kerja sama semua pihak, kami harapkan Rencana Kerja (RENJA) ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam pelaksanaan penyelenggaraan program pembangunan dan pemerintahan

Pariaman, 17 Oktober 2025

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



Dra. SUMARNLM.Pd
Pembina Utama Muda/NIP.196810231993032002

HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAN

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRA EVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 – 2029	
2.	Renstra Priode 2025 – 2029	
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 – 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJIP Tahun 2025	
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	
14.	Renja Tahun 2026	
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,



(SUNARIYATI, SE)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	